

ABSTRACT

Benua Afrika merupakan wilayah yang paling terdampak oleh wabah HIV/AIDS. Sebagian besar dari negara-negara Afrika memiliki hak dan kebebasan untuk memanfaatkan berbagai fleksibilitas dari Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) oleh WTO, termasuk dalam mendapatkan akses terhadap obat-obatan HIV/AIDS yang terjangkau – namun, negara-negara Afrika masih berprogres secara lambat dalam memaksimalkan penggunaan berbagai fleksibilitas yang dibutuhkan. Walaupun jumlah total masyarakat dalam pengobatan antiretroviral (ART) sebagai metode pengobatan yang paling umum telah meningkat tiap tahunnya, ketimpangan dan ketidaksetaraan antara negara-negara Afrika masih ada, khususnya di obat-obatan antiretroviral (ARV) jangka panjang untuk pasien yang hidup lebih lama dan berada dalam perlindungan hak paten. Selain itu, masih ada jumlah total masyarakat pengidap HIV dalam jumlah besar yang tidak dalam ART. Maka dari itu, makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana negara-negara Afrika telah mengadopsi fleksibilitas-fleksibilitas TRIPS terkait aturan-aturan paten untuk obat-obatan HIV/AIDS – dan bagaimana dinamika politik dalam rezim-rezim perlindungan paten bisa mempengaruhi pengimplementasian fleksibilitas-fleksibilitas TRIPS oleh negara-negara tersebut. Dengan menggunakan ‘*international regime complexity*’ dan ‘*problem-structural approach*’ oleh teori rezim neoliberal – dan dengan menganalisis pengimplementasian fleksibilitas-fleksibilitas TRIPS oleh negara-negara Afrika dalam akses ke obat-obatan HIV/AIDS terjangkau sejak Deklarasi Doha 2001, makalah ini menemukan bahwa pemanfaatan fleksibilitas-fleksibilitas tersebut tidak optimal karena dua alasan utama: (1) *patent regime complexity* yang menunjukkan afiliasi negara-negara Afrika dengan kerangka-kerangka kebijakan perlindungan paten yang saling tumpang tindih dalam akses ke obat-obatan HIV/AIDS; (2) dan lemahnya kecenderungan anggota rezim TRIPS di bawah WTO untuk bekerja sama dalam domain kebijakan hak-hak asasi manusia dan peraturan, khususnya dalam isu hak atas kekayaan intelektual dan hak atas kesehatan publik yang saling berhubungan.

Kata kunci: Afrika, fleksibilitas TRIPS, HIV/AIDS, teori rezim neoliberal, kesehatan publik

African continent is the most affected region by the HIV/AIDS epidemic. While the majority African states have the right and freedom to capitalize Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) flexibilities of the WTO, including in gaining access to lower-priced HIV/AIDS medicines, African countries have been at a slow progress in maximizing the necessary flexibilities. Although the total number of people on antiretroviral treatment (ART)



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Patent vs. Public Health: Evaluating the Implementation of TRIPS Flexibilities by African Countries on Access to HIV/AIDS Medicines

LOUIS BUDIMAN, Dr. Poppy Sulistyning Winanti, M.P.P., M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

as the most common HIV/AIDS treatment has been increasing year by year, gap and inequality among African countries still persist, particularly on the patented antiretrovirals (ARVs) and long-term ART for HIV patients who live longer. Moreover, there is a significant number of people living with HIV in Africa who are still not on the ART. Thus, this paper aims to evaluate the extent of African countries in adopting TRIPS flexibilities in relation with patent rules on HIV/AIDS medicines – and how the political dynamics in patent protection regimes can affect the implementation of TRIPS flexibilities by the countries. By using ‘international regime complexity’ and ‘problem-structural approach’ of the neoliberal regime theory – and by analyzing the implementation of TRIPS flexibilities by African states on the access to lower-priced HIV/AIDS medicines since the Doha Declaration 2001, this paper found that the utilization of the available flexibilities has not been optimal due to two main reasons: (1) patent regime complexity in which the African states are affiliated with overlapping IP frameworks on the access to HIV/AIDS medicines; (2) and the weak tendency of regime members under the TRIPS Agreement of the WTO to cooperate on the policy domain of rights and rules, particularly on the interconnected issue of intellectual property right and the right to health.

Keywords: Africa, TRIPS flexibilities, HIV/AIDS, neoliberal regime theory, public health